



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



Rencana Kerja

Tahun 2023

**Badan
Kepegawaian
dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia**

**Kabupaten
Mojokerto**

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	68
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	73
3.2 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah.....	76
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	98
BAB IV PENUTUP	115

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang disusun pada Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun kedepan, yang merupakan pedoman pelaksanaan diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Perangkat Daerah dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, Januari 2022
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19660618 199003 1 011

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja BKPSDM tahun 2023 memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Renja yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternatif untuk mencapai sasaran Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah:

1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
 24. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 26. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah :

1. Merupakan arah dan pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pembangunan SDM Aparatur dalam jangka 1 (satu) tahun kedepan tahun 2023;
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pembangunan SDM Aparatur;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN;

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah. Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023.

Bab V P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 secara umum selaras dengan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dilakukan mapping sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2021 sebesar 77% dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 17.268.587.434,00
- Pengurangan APBD	Rp. 1.332.077.077,00
- Anggaran setelah Perubahan APBD	Rp. 15.936.510.357,00
- Realisasi	Rp. 12.234.045.067,00
- Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. 5.448.551.201,00

Program dan Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah mencakup kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan :
 - Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.
 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan:
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan:
 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mencakup kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Sedangkan untuk capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2021 pada umumnya baik meskipun ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena pandemic COVID-19. Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 15.936.510.357,00 realisasi sebesar Rp. 12.234.045.067,00 atau terserap sebesar 77%.

Dengan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Profesionalisme ASN

Pencapaian target kinerja tahun 2021 atas sasaran ini adalah :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			Anggaran	Realisasi
				Target	Realisasi	Capaian Program		
1.	Program Kepegawaian Daerah - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - Mutasi dan Promosi ASN - Pengembangan Kompetensi ASN - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Persentase ASN yang sesuai kompetensi (memenuhi syarat jabatan)	85%	87%	103%	3.508.823.316	1.947.297.491
			Persentase ASN dengan kompensasi tunjangan kinerja	96%	99,61%	104%	730.361.253	535.496.000
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia - Pengembangan Kompetensi Teknis - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang berkinerja baik	99,05%	99,05%	100%	2.406.858.000	2.268.088.380
			Persentase ASN melanggar disiplin	7%	0,18%	197,4%	2.996.512.205	2.146.045.000

Dalam melakukan penataan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Sehingga dalam melakukan penataan ASN memperhatikan jumlah kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 7.168 PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.2
Jumlah Pejabat Tahun 2021

NO	Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	24
2.	Jabatan Administrasi	
	- Administrator (Eselon III)	189
	- Pengawas (Eselon IV)	539
	- Pelaksana	2.015
3.	Jabatan Fungsional	
	- Fungsional Pendidikan	3.450
	- Fungsional Kesehatan	815
	- Fungsional lainnya	136
	Jumlah	7.168

2. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
S3	2
S2	547
SI	3.955
D4	146
D3	524
D2	512
D1	30
SMA/SMK	1.221
SMP	183
SD	48
Jumlah	7.168

Perhitungan jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan formasi dan syarat jabatan dikatakan memenuhi syarat apabila memenuhi kriteria pendidikan, Diklat, pengalaman kerja/jabatan, keterampilan dan keahlian. Sehingga PNS di katakan memenuhi syarat apabila memenuhi minimal 4 (empat) unsur tersebut.

Berdasarkan tabel diatas tersebut, maka hasil perhitungan persentase jumlah ASN yang memenuhi syarat jabatan dengan formulasi Jumlah ASN yang memenuhi syarat jabatan di bagi dengan jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 85% terealisasi sebesar 87%, sehingga target pada tahun 2021 tercapai dengan capaian kinerja sebesar 103%. Perhitungan tersebut di dapatkan bahwa pada tahun 2021 dari 7.168 ASN Pemerintah Kabupaten Mojokerto, masih ada 932 PNS yang belum memenuhi syarat jabatan, dikarenakan Pejabat Struktural yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan maupun PNS yang belum memenuhi Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan.

(Tabel 2.4 dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tabel TC.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN 2021

KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2016-2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kegiatan Tahun	
									Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi
1					2	3	4	5	6	
4	05				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian					
04	05	06			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
04	05	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	
04	05	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	
04	05	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan / perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	36 Unit	24 Unit	6 Unit	
04	05	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	
04	05	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	
04	05	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	
04	05	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan mamin tamu dan rapat yang disediakan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	
04	05	06	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas yang dibutuhkan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	
04	05	06	01	23	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan jasa dan tenaga kerja yang dibutuhkan selama 12 bulan	36 Tenaga Non PNS	24 Tenaga Non PNS	6 Tenaga Non PNS	
04	05	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100 %	100 %	100 %	
04	05	06	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda empat	1 Unit	-	1 Unit	

04	05	06	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis meubel yang tersedia	4 Set	-	4 Set	
04	05	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang dilakukan	6 gedung	4 gedung	1 gedung	
04	05	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang di lakukan	36 Unit	20 Unit	6 unit	
04	05	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang di lakukan	24 Jenis	18 Jenis	6 jenis	
04	05	06	02	29	Pemeliharaan Rutin Gedung Balai Diklat	Jumlah Pemeliharaan Gedung Balai Diklat yang dilakukan	3 gedung	3 gedung	-	
04	05	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentas pegawai dengan tingkat kedisiplinan kedinasn sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	-	100 %	
04	05	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	118 stel	114 stel	-	
04	05	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	
04	05	06	06	05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD yang dihasilkan	42 dokumen	35 dokumen	7 dokumen	7
04	05	06	28		Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan lulus dengan predikat baik	100 %	99 %	-	
04	05	06	28	01	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Fungsional	Jumlah Peserta Diklat yang dikirim	158 orang	148 orang	-	
04	05	06	28	02	Diklat Kepemimpinan	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya	187 orang	187 orang	-	
04	05	06	28	03	Diklat Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti prajabatan	190 orang	50 orang	-	
04	05	06	28	04	Diklat Teknis Struktural/Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai dengan hasil analisa kebutuhan diklat	1750 orang	1184 Orang	-	
04	05	06	28	07	Pengelolaan Administrasi Ijin Belajar	Jumlah ASN yang mengajukan ijin belajar	643 orang	557 orang	-	
04	05	06	28	05	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah peserta yang ikut Ujian Dinas	10 orang	-	-	
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan	81 %	83,72 %	-	

						formasi kebutuhan dan syarat jabatan					
04	05	06	30	04	Pemeliharaan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang terawat / terpelihara	4 Aplikasi	4 Aplikasi			-
04	05	06	30	09	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah buku profil dan informasi kepegawaian	Buku profil 300, DUK 12, Bezzeting 12	Buku profil 300, DUK 12, Bezzeting 12			-
04	05	06	30	09	Penataan dan Pemeliharaan Arsip perorangan PNS	Jumlah file PNS yang terpelihara	17.246 PNS	17.246 PNS			-
04	05	06	30	07	Pengembangan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	4 Aplikasi	4 Aplikasi			-
04	05	06	30	09	Pelayanan dan Pengolahan Data PNS	Jumlah identitas pegawai yang diterbitkan	3215 PNS	3215 PNS			-
04	05	06	30	01	Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas kepegawaian (Kenaikan pangkat, pension, dll) ASN yang di kelola	3964 berkas	3964 berkas			-
04	05	06	30	08	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan Formasi ASN yang tersusun	302 pengelola kepegawaian	302 pengelola kepegawaian			-
04	05	06	30	05	Penyusunan Program Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen program pengembangan yang tersusun	158 OPD	158 OPD			-
04	05	06	30	10	Pengadaan CPNS ASN	Jumlah CPNS yang di terima	179 orang	175 orang			-
04	05	06	30	07	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural	Jumlah pejabat yang di mutasi	480 PNS	308 PNS			-
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,01 %	99,04 %			-
04	05	06	30	13	Pengujian Kesehatan Bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti general check up bagi pejabat struktural / PNS	710 orang	710 orang			-
04	05	06	30	18	Pemberian Penghargaan PNS	Jumlah PNS yang menerima penganugerahan Satyalancana Karya Satya	502 orang	444 orang			-
04	05	06	30	36	Pengelolaan Administrasi Penilaian Kerja PNS	Jumlah ASN yang melaporkan penilaian prestasi kerjanya tepat waktu	41.500 PNS	24.589 PNS			-
04	05	06	30	52	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai ASN yang lebih terukur dan memiliki kredibilitas dan realibitas ketersediaan data	82	73			82
04	05	06	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	99 %	33,33 %			-
04	05	06	30	06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan	6 dokumen	5 dokumen			-
04	05	06	30	10	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Jumlah PNS yang wajilapor LP2P	17178 PNS	16765 PNS			-

04	05	06	30	14	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	Jumlah laporan LHKPN penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN	850 orang	306 WL	-	
04	05	06	30	16	Pelaksanaan Sumpah PNS	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah	500 orang	60 orsng	-	
04	05	06	30	21	Revolusi Mental ASN	Jumlah peserta yang ikut pembinaan	500 peserta	280 peserta	-	
04	05	06	30	29	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Presensi Berbasis Finger Print On Line	Jumlah aplikasi dan jaringan Mesin Finger Print	6 aplikasi	5 aplikasi (492 node jaringan)	-	
04	05	06	30	45	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang di selesaikan	31 PNS	31 PNS	-	
04	05	06	30	46	Penyelesaian Kasus Rumah Tangga	Jumlah Kasus rumah tangga PNS yang di selesaikan	44 PNS	29 PNS	-	
04	05	06	30	47	Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase tingkat kehadiran PNS	100 %	85%	-	
04	05	06	30	48	Pembinaan dan Evaluasi Manajemen Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Evaluasi Manajemen Kepegawaian	452 peserta	443 peserta	-	
04	05	06	31		Program penatausahaan ASN	Persentase ASN yang menduduki Jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan dan syarat jabatan	84 %	-	-	
04	05	06	31	01	Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah berkas kepegawaian (Kenaikan pangkat, pension, dll) ASN yang di kelola	3905 berkas	1894 berkas	-	
04	05	06	31	02	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural	Jumlah ASN yang di mutasi	1445 PNS	975 PNS	-	
04	05	06	31	03	Pelayanan dan Pengolahan Data PNS	Jumlah identitas pegawai yang diterbitkan	5000 PNS	3417 PNS	-	
04	05	06	31	04	Pemeliharaan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang terawat / terpelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	
04	05	06	31	05	Penyusunan Program Pengembangan Pegawai	Jumlah dokumen program pengembangan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	-	
04	05	06	31	06	Penataan dan Pemeliharaan Arsip perorangan PNS	Jumlah file PNS yang terpelihara	8120 PNS	8120 PNS	-	
04	05	06	31	07	Pengembangan SIMPEG	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	
04	05	06	31	08	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan Formasi ASN yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	-	
04	05	06	31	09	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah buku profil dan informasi kepegawaian	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	Buku profil 275, Duk 12, Bezeting 12	-	
04	05	06	31	11	Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah ASN yang	8317 data	8317 data	-	

						terekonsiliasi datanya					
04	05	06	31	12	Pengadaan PPPK	Jumlah PPPK yang di terima dan di angkat	373 orang	-	-		
04	05	06	32	03	Perencanaan dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen pemenuhan kebutuhan/formasi ASN	10 dokumen	-	-		
Program Kegiatan Tahun 2020											
4	05	06	32		Program Pengembangan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan lulus dengan predikat baik	93%	-	93%		
4	05	06	32	01	Peningkatan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	130 ASN	-	130 ASN		
4	05	06	32	02	Pelatihan Dasar/Prajabatan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti latihan dasar/prajabatan	60 CPNS	-	60 CPNS		
						Persentase kebutuhan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK	85%	-	85%		
4	05	06	32	03	Perencanaan dan pengadaan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/ formasi ASN	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 D	
						Persentase ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja	95%	-	95%		
4	05	06	32	04	Pengembangan karier ASN	Jumlah dokumen pengembangan ASN	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 D	
4	05	06	33		Program Penataan ASN	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai syarat jabatan	84,75%	-	84,75%		
4	05	06	33	01	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun, dll) ASN yang di kelola	2150 Berkas	-	2150 Berkas	19	
4	05	06	33	02	Pelaksanaan Mutasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang di mutasi	730 ASN	-	730 ASN		
4	05	06	34		Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian	Persentase peningkatan capaian penilaian prestasi kinerja ASN dengan nilai baik	99,04%	-	99,04%		
4	05	06	34	01	Peningkatan Kinerja ASN	Jumlah dokumen peningkatan kinerja ASN	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 D	
4	05	06	34	02	Evaluasi Manajemen ASN	Indeks pelayanan kepegawaian	250 (Baik)	-	250 (Baik)	209	(ku)
						Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	9%	-	9%		
4	05	06	34	03	Pembinaan ASN	Jumlah dokumen pembinaan ASN	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 D	
						Persentase akurasi data kepegawaian	75%	-	75%		
4	05	06	34	04	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai ASN	Jumlah aplikasi yang terkelola	6 Aplikasi	-	6 Aplikasi	6 A	
4	05	06	34	05	Rekonsiliasi Data ASN	Jumlah data ASN yang telah di rekonsiliasi	8350 data ASN	-	8350 data ASN		d
4	05	06	34	06	Pengelolaan dokumen	Jumlah dokumen	8350	-	8350		

					kepegawaian ASN	perorangan ASN yang dikelola	dokumen kepegawaian		dokumen kepegawaian	d
--	--	--	--	--	-----------------	------------------------------	---------------------	--	---------------------	---

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Hasil Penyesuaian (Pemutakhiran) pada tahun 2021, Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dapat diuraikan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi Peraturan Perundang undangan;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
- b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah Perangkat Daerah yang membantu melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan dalam bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur urusan Pemerintah Daerah, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NPSK). Tetapi indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah. Sebagaimana dapat di uraikan pada Tabel TC-30 berikut:

Tabel TC.30
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN MOJOKERTO

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rentsra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				2019	2020	2021	2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023		
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+2)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Ratio PNS terhadap penduduk	n/a	0,1%	0,1%	n/a	n/a	n/a	0,1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	PNS yang Memiliki Kualifkasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Tesehatan)	n/a	17%	17%	n/a	n/a	n/a	17%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	2%	2%	n/a	n/a	n/a	2%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
- b. Perencanaan kebutuhan ASN belum disusun secara komprehensif;
- c. Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan;
- d. Pengembangan kompetensi ASN belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi secara maksimal.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah

unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara organisasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto bertugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto. Kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan fungsi tersebut meliputi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permasalahan Internal, hambatan :

- 1) Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 2) Belum tersusunnya perencanaan ASN yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis pada kinerja;
- 3) Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan sehingga belum bisa mengakomodir kebutuhan riil organisasi;
- 4) Pengembangan kompetensi ASN belum bisa dilaksanakan secara optimal;
- 5) Kualitas sistem informasi kepegawaian yang belum maksimal.

2. Faktor Permasalahan External, hambatan :

- 1) Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan;

- 2) Masih rendahnya disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 3) Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 satu diantaranya yaitu keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017. Tantangan dan Permasalahan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- Tersedianya dana.
- Adanya Peraturan Perundangan-undangan di bidang kepegawaian:
 - a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Perda No. 12 Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto;

- e. Perbup. No. 66 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perbup No. 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.
- Adanya Program Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto :
 - a. Program peningkatan disiplin aparatur;
 - b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - c. Program peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;
 - d. Program pembangunan dan pengembangan database melalui Sistem Informasi Kepegawaian On-Line.
 - Situasi kerja yang kondusif :

Iklim kerja yang kondusif untuk pelaksanaan tugas

Tantangan dan permasalahan serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi / catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto yaitu;

1. Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah berkaitan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat

- mewujudkan konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana;
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada;
 4. Koordinasi terpadu berbasis sistem dan komitmen perencanaan dalam kebersamaan;
 5. Efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik),

Tabel TC.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2023

KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	BKPSDM Kab. Mojokerto	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,40 (A)	6,548,133,233		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	BKPSDM Kab. Mojokerto	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,40 (A)	6,548,133,233
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90%	15,000,000	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90%	15,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7,500,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 dokumen	7,500,000

	Daerah		yang dapat Tersusun				Daerah		Daerah		
	1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	4,500,000		1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	4,500,000
	2. Renja Perubahan Perangkat Daerah	Penyusunan	Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1 dokumen	3,000,000		2. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1 dokumen	3,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat Tersusun	6 dokumen	7,500,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	7,500,000
	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan		Jumlah Dokumen Evaluasi tiap Tribulan	4 dokumen	4,000,000		1. Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan		Jumlah Dokumen Evaluasi tiap Tribulan	4 dokumen	4,000,000
	2. Penyusunan Dokumen LKjIP		Jumlah Dokumen LKjIP	1 dokumen	2,500,000		2. Penyusunan Dokumen LKjIP		Jumlah Dokumen LKjIP	1 dokumen	2,500,000
	3. Penyusunan Dokumen SAKIP		Jumlah Dokumen SAKIP	1 dokumen	1,000,000		3. Penyusunan Dokumen SAKIP		Jumlah Dokumen SAKIP	1 dokumen	1,000,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87%	5,893,894,000	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87%	5,893,894,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	5,893,894,000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	5,893,894,000

	1. Anggaran Penyediaan Gaji ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji ASN	38 Orang /bulan	3,032,134,000		1. Anggaran Penyediaan Gaji ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji ASN	38 Orang /bulan	3,032,134,000
	2. Anggaran Penyediaan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	38 Orang /bulan	2,861,760,000		2. Anggaran Penyediaan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	38 Orang /bulan	2,861,760,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	81.5	5,000,000	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	81.5	5,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai BKPP yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai BKPP yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	38 Orang	5,000,000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	38 Orang	5,000,000
	Biaya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	38 Orang	5,000,000		Biaya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	38 Orang	5,000,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	86%	279,967,353	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	86%	279,967,353
	Penyediaan Peralatan dan	BKPSDM Kab.	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	75,000,000		Penyediaan Peralatan dan	BKPSDM Kab.	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	75,000,000

Perengkapan Kantor	Mojokerto	Perengkapan Kantor yang Disediakan		
Belanja Peralatan dan Perengkapan Kantor berupa Laptop, Printer Laser, Air Purifier, AC Split, PC Dekstop All In One, Printer Warna, Scanner	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	14,160,853
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mamin Rapat yang Disediakan	8 paket	14,160,853
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	48,150,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	48,150,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	21,400,000

Perengkapan Kantor	Mojokerto	Perengkapan Kantor yang Disediakan		
Belanja Peralatan dan Perengkapan Kantor berupa Laptop, Printer Laser, Air Purifier, AC Split, PC Dekstop All In One, Printer Warna, Scanner	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	14,160,853
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mamin Rapat yang Disediakan	8 paket	14,160,853
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	48,150,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	48,150,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	8 dokumen	21,400,000

	Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	21,400,000
	Penyediaan Bahan / Material	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 paket	39,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 paket	39,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	9,550,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	9,550,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	72,706,500
	Biaya Perjalanan Dinas pegawai	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 laporan	72,706,500
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah unit pengadaan barang milik	-	-

		Disediakan		
	Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21,400,000
	Penyediaan Bahan / Material	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	39,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	39,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,550,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,550,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,706,500
	Biaya Perjalanan Dinas pegawai	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72,706,500
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah unit pengadaan barang milik	-

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		daerah yang tersedia				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		daerah yang tersedia		
	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah unit Meubeler yang tersedia	-	-		Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah unit Meubeler yang tersedia	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	91%	191,146,880	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	91%	191,146,880
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56,000,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56,000,000
	1. Biaya Rekening Telepon dan Internet	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	30,000,000		1. Biaya Rekening Telepon dan Internet	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	30,000,000
	2. Biaya Rekening Listrik	Biaya Rekening Listrik		12 laporan	26,000,000		2. Biaya Rekening Listrik	Biaya Rekening Listrik		12 laporan	26,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	135,146,880		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	135,146,880

	1. Belanja Gaji untuk Tenaga Harian Lepas / Non ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	135,146,880		1. Belanja Gaji untuk Tenaga Harian Lepas / Non ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	135,146,880
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	88%	163,125,000	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	88%	163,125,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	66,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	66,000,000
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	5 unit	56,000,000		1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	5 unit	56,000,000
	2. Biaya Perizinan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya	7 unit	10,000,000		2. Biaya Perizinan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya	7 unit	10,000,000

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	72,125,000		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	72,125,000
	1.Biaya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	72,125,000		1.Biaya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	72,125,000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	25,000,000		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	25,000,000
	1.Biaya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2unit	25,000,000		1.Biaya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	25,000,000
	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	73%	4,880,092,000		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	74%	4,880,092,000
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/ formasi ASN, aplikasi sistem informasi yang	78%	3,206,950,000	8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/ formasi ASN, aplikasi sistem	79%	3,206,950,000

			dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya					informasi yang dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya			
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	2 dokumen	60,000,000		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	2 dokumen	60,000,000
	1.Persiapan Penyusunan Kebutuhan dengan seluruh PD/UKPD	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan rencana kebutuhan ASN (Pengelolaan Formasi Pegawai)	1 dokumen	10,000,000		1.Persiapan Penyusunan Kebutuhan dengan seluruh PD/UKPD	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan rencana kebutuhan ASN (Pengelolaan Formasi Pegawai)	1 dokumen	10,000,000
	2.Asistensi Penyusunan Kebutuhan dengan seluruh PD/UKPD			1 dokumen	28,000,000		2.Asistensi Penyusunan Kebutuhan dengan seluruh PD/UKPD			1 dokumen	28,000,000
	3.Pelaksanaan kegiatan Koordinasi terkait ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait			1 dokumen	22,000,000		3.Pelaksanaan kegiatan Koordinasi terkait ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait			1 dokumen	22,000,000
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi	3 dokumen	100,000,000		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan	3 dokumen	100,000,000

			Pengadaan PNS dan PPPK					Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
	1.Mamin rapat persiapan Pelaksanaan Sumpah PNS dan Penyerahan SK	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		10,000,000		1.Mamin rapat persiapan Pelaksanaan Sumpah PNS dan Penyerahan SK	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	10,000,000
	2.Pelaksanaan Sumpah PNS	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	40,000,000		2.Pelaksanaan Sumpah PNS	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen 40,000,000
	3.Penyerahan SK CPNS/PNS/PPP K serentak secara langsung	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	30,000,000		3.Penyerahan SK CPNS/PNS/PPP K serentak secara langsung	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen 30,000,000
	4.Pelaksanaan kegiatan koordinasi terkait rencana pengadaan ASN ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	20,000,000		4.Pelaksanaan kegiatan koordinasi terkait rencana pengadaan ASN ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen 20,000,000

	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN dan Evaluasi Pengadaan ASN	4 dokumen	2,500,000,000		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN dan Evaluasi Pengadaan ASN	4 dokumen	2,500,000,000
	1.Pelaksanaan kegiatan Koordinasi terkait rencana pengadaan ASN ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	66,745,050		1.Pelaksanaan kegiatan Koordinasi terkait rencana pengadaan ASN ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	66,745,050
	2.Kegiatan seleksi administratif pengadaan CPNS	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	55,533,520		2.Kegiatan seleksi administratif pengadaan CPNS	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	55,533,520
	3.Pelaksanaan SKD	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1,645,500,330		3.Pelaksanaan SKD	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1,645,500,330
	4.Pelaksanaan SKB	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	732,221,100		4.Pelaksanaan SKB	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	732,221,100

	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem	5 dokumen	355,000,000		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem	5 dokumen	355,000,000
	1. Pemeliharaan Aplikasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	54,603,830		1. Pemeliharaan Aplikasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	54,603,830
	2. Pengadaan server dan upgrade infrastruktur	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	195,136,400		2. Pengadaan server dan upgrade infrastruktur	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	195,136,400
	3. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	68,420,770		3. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	68,420,770
	4. Implementasi dan Evaluasi Aplikasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	7,985,000		4. Implementasi dan Evaluasi Aplikasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	7,985,000
	5. Kegiatan rapat dan Koordinasi Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian dengan instansi terkait	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	28,854,000		5. Kegiatan rapat dan Koordinasi Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian dengan instansi terkait	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	28,854,000

	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5 dokumen	191,950,000		Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5 dokumen	191,950,000
	1.Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	83,250,000		1.Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	83,250,000
	2.Cetak Media Informasi Data Kepegawaian (Buku Profil/Buletin, DUK,Laporan)	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	26,418,000		2.Cetak Media Informasi Data Kepegawaian (Buku Profil/Buletin, DUK,Laporan)	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	26,418,000
	3. Pengelolaan Arsip Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	29,100,000		3. Pengelolaan Arsip Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	29,100,000
	4.Pelayanan Usul Kartu Kepegawaian (KARSU, KARIS, KARPEG, ID Card)	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	22,818,000		4.Pelayanan Usul Kartu Kepegawaian (KARSU, KARIS, KARPEG, ID Card)	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	22,818,000
	5. Kegiatan rapat dan Koordinasi Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	29,944,000		5. Kegiatan rapat dan Koordinasi Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	29,944,000

	dengan instansi terkait						dengan instansi terkait				
9	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah mutasi/promosi ASN, dan ASN yang naik pangkat	15 dokumen	1,084,787,000	9	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah mutasi/promosi ASN, dan ASN yang naik pangkat	15 dokumen	1,084,787,000
	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	9 dokumen	704,787,000		Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	9 dokumen	704,787,000
	1.Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Seleksi Terbuka	1 dokumen	541.597.000		1.Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Seleksi Terbuka	1 dokumen	541.597.000
	2.Pelantikan JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelantikan JPTP, pelantikan Jabatan Administrator dan pelantikan Jabatan Fungsional	4 dokumen	68.420.000		2.Pelantikan JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelantikan JPTP, pelantikan Jabatan Administrator dan pelantikan Jabatan Fungsional	4 dokumen	68.420.000
	3.Biaya Setor Penilaian Kompetensi ASN/Assesment	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kompetensi ASN	4 dokumen	94.770.000		3.Biaya Setor Penilaian Kompetensi ASN/Assesment	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kompetensi ASN	4 dokumen	94.770.000

	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dokumen	380,000,000		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dokumen	380,000,000
	1.Kenaikan Pangkat Terpadu Periode April dan Oktober	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	213,912,000		1.Kenaikan Pangkat Terpadu Periode April dan Oktober	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	213,912,000
	2.Monitoring dan Evaluasi Pangkat dan Pensiun Mei dan Nopember	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	70,598,000		2.Monitoring dan Evaluasi Pangkat dan Pensiun Mei dan Nopember	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	70,598,000
	3.Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Serentak Periode April dan Oktober	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	95,490,000		3.Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Serentak Periode April dan Oktober	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	95,490,000
10	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	125 ASN	50,000,000	10	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	125 ASN	50,000,000
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	125 ASN	50,000,000		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	125 ASN	50,000,000
	1.Pelaksanaan Ujian Dinas	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		25,000,000		1.Pelaksanaan Ujian Dinas	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		25,000,000
	2.Pelaksanaan	BKPSDM	Jumlah ASN yang		25,000,000		2.Pelaksanaan	BKPSDM	Jumlah ASN		25,000,000

	Tugas Belajar	Kab. Mojokerto	Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				Tugas Belajar	Kab. Mojokerto	yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin		538,775,000	11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin		538,775,000
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 dokumen	198,775,000		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 dokumen	198,775,000
	1.Pengujian kesehatan CPNS dan PNS Sakit	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	113,407,000		1.Pengujian kesehatan CPNS dan PNS Sakit	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	113,407,000
	2.Fasilitasi dan sosialisasi penyusunan SKP	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	1 dokumen	16,928,000		2.Fasilitasi dan sosialisasi penyusunan SKP	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	1 dokumen	16,928,000
	3.Fasilitasi penilaian NSPK, merit sistem	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja		14,740,000		3.Fasilitasi penilaian NSPK, merit sistem	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja		14,740,000

	4. Honorarium tenaga ahli dari KASN, dan BKN dalam rangka Penilaian NSPK dan Merit System	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja		37,400000		4. Honorarium tenaga ahli dari KASN, dan BKN dalam rangka Penilaian NSPK dan Merit System	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja		37,400000
	5. Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi BKN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja		16,300,000		5. Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi BKN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja		16,300,000
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 orang	40,000,000		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 orang	40,000,000
	1. Konsultasi dan Fasilitasi Pemberian Penghargaan Satya Lencana (variabel penilaian NSPK)	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 orang	40,000,000		1. Konsultasi dan Fasilitasi Pemberian Penghargaan Satya Lencana (variabel penilaian NSPK)	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 orang	40,000,000
	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	45 orang	300,000,000		Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	300,000,000
	1. Sosialisasi Peraturan Disiplin PNS	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		11,188,000		1. Sosialisasi Peraturan Disiplin PNS	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		11,188,000
	2. Fasilitasi pembinaan rumah tangga	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	25 orang	129,875,000		2. Fasilitasi pembinaan rumah tangga	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	25 orang	129,875,000

	PNS (mediasi dg Ibu Bupati, ketua dharma wanita, kemenag)		Kedisiplinan				PNS (mediasi dg Ibu Bupati, ketua dharma wanita, kemenag)		Pembinaan Kedisiplinan		
	3.Fasilitasi pembinaan dan penyelesaian kasus disiplin PNS (termasuk kegiatan SIDAK)	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 orang	158,937,000		3.Fasilitasi pembinaan dan penyelesaian kasus disiplin PNS (termasuk kegiatan SIDAK)	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 orang	158,937,000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase peningkatan kompetensi ASN	64,70%	1,175,550,000		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase peningkatan kompetensi ASN	64,70%	1,175,550,000
12	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin	5350 ASN	545,550,000	12	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin	5350 ASN	545,550,000
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5350 ASN	545,550,000		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5350 ASN	545,550,000

	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
	1.Penyelenggaraan diklat, pelatihan, bimbingan teknis	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Kompetensi	5350 orang	545,550,000		1.Penyelenggaraan diklat, pelatihan, bimbingan teknis	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Kompetensi	5350 orang	545,550,000
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	24 laporan	630,000,000	13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	24 laporan	630,000,000
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24 laporan	630,000,000		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24 laporan	630,000,000

									dan Prajabatan		
	1.Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	10 laporan	300,000,000		1.Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	10 laporan	300,000,000
	2.Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	10 laporan	220,000,000		2.Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	10 laporan	220,000,000
	3.Honorarium PPTK, ATK , mamin, sppd dll	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4 laporan	110,000,000		3.Honorarium PPTK, ATK , mamin, sppd dll	BKPSDM Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4 laporan	110,000,000
					12.603.775.233						12.603.775.233

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto yang juga selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Kepegawaian, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG, sehingga penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung belum dapat dilaksanakan.

Dapat di uraikan sebagai berikut pada Tabel TC-32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional

pasal 20 dan pasal 21 (pimpinan kementerian / lembaga menyusun rancangan renja KL dengan mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra – KL serta pagu indikatif, maka dengan mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, tujuan, sasaran dan kegiatan pembangunan pada rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kementerian/Kelembagaan. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto meliputi 3 (tiga) kementerian / Kelembagaan yaitu :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN – RB memiliki visi “*mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani*” dan misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”

Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu :

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumberdaya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu :

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalitas pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;

- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementrian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, yaitu Program Pengembangan ASN, Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian dan Program Penataan ASN. Dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto melaksanakan penataan pegawai negeri sipil dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi serta pengadaan ASN secara terbuka.

3. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemn kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah *“menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi”* dimana Badan Kepegawaian Negara memiliki stretegi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur, dan pemantapan pelaksanaan

reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur. Hal ini memberikan arah dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Program dan Kegiatan yang dimuat dalam Renja merupakan penjabaran dan tindak lanjut dalam Renstra dan Strategi Badan Kepegawaian Negara yaitu Program Pengembangan ASN, Program Pembinaan ASN dan Informasi Kepegawaian.

4. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah *“Menjadi Institusi yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”*. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan mengacu pada visi dan misi LAN

diketahui bahwa program dan kegiatan program pengembangan ASN selaras dengan kebijakan Nasional yang ada pada Lembaga Administrasi Negara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah **“Meningkatkan Integritas dan Profesionalitas ASN”** dengan Indikator Tujuan Indeks Profesionalitas ASN, Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renja perubahan;
- 2) Menggambarkan arah renja organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renja perubahan.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi Organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Pada tahun 2023 terdapat satu sasaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

- **Meningkatnya Profesionalitas ASN**

Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi Organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Meningkatkan kemampuan SDM tentang Administrasi kepegawaian;
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana BKPSDM
3. Melaksanakan Mutasi dan Promosi yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas PNS;
4. Melaksanakan proses Kenaikan Pangkat PNS;
5. Melaksanakan proses SK Pensiun secara periodik;
6. Melaksanakan proses pelantikan Jabatan Struktural;
7. Melaksanakan proses seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
8. Melaksanakan proses SK pengangkatan PNS;
9. Melaksanakan proses Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah;
10. Melaksanakan pembinaan PNS secara periodik;
11. Melaksanakan analisis kebutuhan dan formasi PNS;
12. Menyelenggarakan dan Melaksanakan Diklat-diklat Aparatur;

13. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;
2. Faktor pencapaian standar pelayanan tupoksi Perangkat Daerah;
3. Faktor Isu penyelenggaraan Tugas Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto;
4. Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokertodan;
5. Faktor program dan kegiatan rutinitas/operasional Perangkat Daerah

b. Uraian Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto dalam periode tahun anggaran 2023 menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

- Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
- b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :
- b. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

c. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 dapat di uraikan pada Tabel TC- 33

Tabel T-C.33
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023
 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
 KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama SKPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	UP	B/L			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
5			Unsur Penunjang Usuran Pemerintahan											
5	03		Kepegawaian											
5	03	01			84,40 (A)	6,548,133,233	-	-	84,80 (A)	7,981,993,380				
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	BKPSDM Kab. Mojokerto	90%	15.000.000	APBD Kab. Mojokerto	-	90%	15.000.000		

5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	5 Dokumen	7.500.000	APBD Kab. Mojokerto	-	5 Dokumen	7.500.000		
					1.Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja		1 dokumen	4,500,000			1 dokumen	4,500,000		
					2.Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perubahan		1 dokumen	3,000,000			1 dokumen	3,000,000		
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	6 Dokumen	7.500.000	APBD Kab. Mojokerto	-	6 Dokumen	7.500.000		
					1.Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan	Jumlah Dokumen Evaluasi tiap Tribulan		4 dokumen	4,000,000			4 dokumen	4,000,000		
					2.Penyusunan Dokumen LKjIP	Jumlah Dokumen LKjIP		1 dokumen	2,500,000			1 dokumen	2,500,000		
					3.Penyusunan Dokumen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP		1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,000,000		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	87%	5,893,894,000	APBD Kab. Mojokerto	-	88%	7,150.000.000		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Mojokerto	76 Orang/bulan	5,893,894,000	APBD Kab. Mojokerto	-	76 Orang/bulan	7,150.000.000		
					1.Anggaran Penyediaan Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji ASN		38 Orang /bulan	3,032,134,000			38 Orang /bulan	4,288,240,000		
					2.Anggaran Penyediaan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima		38 Orang	2,861,760,000			38 Orang /bulan	2,861,760,000		

					Tunjangan ASN		/bulan								
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Mojokerto	81.5	5,000,000	APBD Kab. Mojokerto	-	82	80,000,000		
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai BKPSDM yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Mojokerto	0	0	APBD Kab. Mojokerto	-	38 orang	80,000,000		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi		38 Orang	5,000,000			0	0		
					1.Biaya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi		38 Orang	5,000,000			0	0		
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	BKPSDM Kab. Mojokerto	86%	279,967,353	APBD Kab. Mojokerto	-	87%	308,871,500		
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Mojokerto	1 Paket	75,000,000	APBD Kab. Mojokerto	-	1 Paket	80.310.000		
					1.Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Laptop, Printer Laser, Air Purifier, AC Split, PC Dekstop All In One, Printer Warna, Scanner	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	75,000,000		-	1 Paket	80.310.000		
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Mojokerto	8 paket	14,160,853	APBD Kab. Mojokerto	-	8 paket	20,616,100		
					1.Penyediaan Makanan dan	Jumlah Paket		8 paket	14,160,853			8 paket	20,616,100		

					Minuman Rapat	Mamin Rapat yang Disediakan								
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Mojokerto	10 paket	48,150,000	APBD Kab. Mojokerto	-	10 paket	51,520,500	
					1.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		10 paket	48,150,000			10 paket	51,520,500	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Mojokerto	8 dokumen	21,400,000	APBD Kab. Mojokerto	-	8 dokumen	22,898,000	
					1.Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		8 dokumen	21,400,000			8 dokumen	22,898,000	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BKPSDM Kab. Mojokerto	10 paket	39,000,000	APBD Kab. Mojokerto	-	10 paket	42,000,000	
					1.Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		10 paket	39,000,000			10 paket	42,000,000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Mojokerto	4 laporan	9,550,000	APBD Kab. Mojokerto	-	4 laporan	13,730,900	
					1.Penyediaan Makanan dan	Jumlah		4 laporan	9,550,000			4 laporan	13,730,900	

					Minuman untuk tamu	Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu								
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 laporan	72,706,500	APBD Kab. Mojokerto	-	4 laporan	77,796,000	
					1.Biaya Perjalanan Dinas pegawai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		4 laporan	72,706,500			4 laporan	77,796,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia	BKPSDM Kab. Mojokerto	91%		APBD Kab. Mojokerto	-	91%	45,000,000	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Meubeler yang tersedia	BKPSDM Kab. Mojokerto	0	0	APBD Kab. Mojokerto	-	15 unit	45,000,000	
					Pengadaan Mebel	Jumlah unit Meubeler yang tersedia		0	0			15 unit	45,000,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	BKPSDM Kab. Mojokerto	91%	191,146,880	APBD Kab. Mojokerto	-	91%	206,271,880	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	BKPSDM Kab. Mojokerto	24 Laporan	56,000,000	APBD Kab. Mojokerto	-	24 Laporan	56,000,000	

						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
						1. Biaya Rekening Telepon dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	30,000,000			12 laporan	30,000,000
						2. Biaya Rekening Listrik	Biaya Rekening Listrik		12 laporan	26,000,000			12 laporan	26,000,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Mojokerto	12 laporan	135,146,880	APBD Kab. Mojokerto	-	12 laporan	150,271,880	
						1. Belanja Gaji untuk Tenaga Harian Lepas / Non ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	135,146,880			12 laporan	150,271,880
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	BKPSDM Kab. Mojokerto	88%	163,125,000	APBD Kab. Mojokerto	-	88%	176,850,000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	BKPSDM Kab. Mojokerto	12 unit	66,000,000	APBD Kab. Mojokerto	-	12 Unit	66.000.000	

						Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											
						1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	5 unit	56,000,000			5 unit	56,000,000				
						2. Biaya Perizinan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya	7 unit	10,000,000			7 unit	10,000,000				
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kab. Mojokerto	2 unit	72,125,000	APBD Kab. Mojokerto	-	2 unit	85,850,000				
					1. Biaya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jumlah Sarana Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	72,125,000			2 unit	85,850,000				
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BKPSDM Kab. Mojokerto	7 unit	25,000,000	APBD Kab. Mojokerto	-	7 unit	25.000.000				

					1. Biaya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		7 unit	25,000,000			7 unit	25,000,000		
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN katagori Tinggi	BKPSDM Kab. Mojokerto	73%	4,880,092,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		74%	5,891,857,000		
5	03	02			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/ formasi ASN, aplikasi sistem informasi yang dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola dengan baik arsip kepegawaiannya	BKPSDM Kab. Mojokerto	78%	3,206,950,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		79%	3.166.162,000		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		2 dokumen	60,000,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		2 dokumen	75,000,000		
					1. Persiapan Penyusunan Kebutuhan dengan seluruh PD/UKPD	Jumlah Dokumen penyusunan rencana kebutuhan ASN (Pengelolaan Formasi			10,000,000				15,000,000		

					Pegawai									
					2.Asistensi Penyusunan Kebutuhan dengan seluruh PD/UKPD	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan rencana kebutuhan ASN (Pengelolaan Formasi Pegawai		1 dokumen	28,000,000			1 dokumen	33,000,000	
					3.Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dan koordinasi ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan rencana kebutuhan ASN (Pengelolaan Formasi Pegawai		1 dokumen	22,000,000			1 dokumen	27,000,000	
					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		3 dokumen	100,000,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		3 dokumen	100,000,000	
					1.Rapat persiapan Pelaksanaan Sumpah PNS dan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS/PNS/PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			10,000,000				10,000,000	
					2.Pelaksanaan Sumpah PNS	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dokumen	40,000,000			1 dokumen	40,000,000	
					3.Penyerahan SK CPNS/PNS/PPPK serentak secara langsung	Jumlah Dokumen Kegiatan		1 dokumen	30,000,000			1 dokumen	30,000,000	

						Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK								
						4. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi terkait rencana pengadaan ASN ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		1 dokumen	20,000,000			1 dokumen	20,000,000
						Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		4 dokumen	2,500,000,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		4 dokumen	2,500,000,000
						1. Pelaksanaan kegiatan Rapat dan Koordinasi terkait rencana pengadaan ASN dan ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait lainnya	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		1 dokumen	66,745,050			1 dokumen	66,745,050
						2. Kegiatan seleksi administratif pengadaan CPNS			1 dokumen	55,533,520			1 dokumen	55,533,520
						3. Pelaksanaan SKD			1 dokumen	1,645,500,330			1 dokumen	1,645,500,330
						4. Pelaksanaan SKB			1 dokumen	732,221,100			1 dokumen	732,221,100
5	03	02	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem		5 dokumen	355,000,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		5 dokumen	355,000,000
						1. Pemeliharaan Aplikasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		1 dokumen	54,603,830			1 dokumen	54,603,830

						Sistem Informasi Kepegawaian								
					2. Pengadaan server dan upgrade infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 dokumen	195,136,400			1 dokumen	195,136,400	
					3. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 dokumen	68,420,770			1 dokumen	68,420,770	
					4. Implementasi dan Evaluasi Aplikasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 dokumen	7,985,000			1 dokumen	7,985,000	
					5. Kegiatan rapat dan Koordinasi Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 dokumen	28,854,000			1 dokumen	28,854,000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		5 dokumen	191,950,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		5 dokumen	204,937,000	
					1. Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		1 dokumen	83,250,000			1 dokumen	85,750,000	
					2. Penyediaan Informasi dan Data Kepegawaian (Buku Profil/Buletin, DUK, Laporan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data		1 dokumen	26,418,000			1 dokumen	28,918,000	

					Administrator dan pelantikan Jabatan Fungsional										
					3.Biaya Setor Penilaian Kompetensi ASN/Assesment	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kompetensi ASN	4 dokumen	94.770.000			4 dokumen				
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dokumen	380,000,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		6 dokumen	435,062,000			
					1.Kenaikan Pangkat Terpadu Periode April dan Oktober	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	213,912,000			2 dokumen				
					2.Monitoring dan Evaluasi Pangkat dan Pensiun Mei dan Nopember	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	70,598,000			2 dokumen				
					3.Penyserahan SK Kenaikan Pangkat Serentak Periode April dan Oktober	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	95,490,000			2 dokumen				
					Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	125 ASN	50,000,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		125 ASN	75,000,000			
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	125 ASN	50,000,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		125 ASN	75,000,000			
					1.Pelaksanaan Ujian Dinas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		25,000,000							

					2.Pelaksanaan Tugas Belajar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			25,000,000					
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin			538,775,000	BKPSDM Kab. Mojokerto			1,106,063,000	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 dokumen		198,775,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		2 dokumen	309,123,000	
					1.Pengujian kesehatan CPNS dan PNS Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen		113,407,000					
					2.Fasilitasi dan sosialisasi penyusunan SKP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	1 dokumen		16,928,000					
					3.Fasilitasi penilaian NSPK, merit sistem	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan			14,740,000					

						Evaluasi Kinerja												
						4.Honorarium tenaga ahli dari KASN, dan BKN dalam rangka Penilaian NSPK dan Merit System	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja			37,400,000								
						5.Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi BKN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja			16300000								
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		200 orang	40,000,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		200 orang	110,000,000					
						1.Konsultasi dan Fasilitasi Pemberian Penghargaan Satya Lencana (variabel penilaian NSPK)	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 orang	40,000,000									
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		45 orang	300,000,000	BKPSDM Kab. Mojokerto		40 orang	686,940,000					
						1.Sosialisasi Peraturan Disiplin PNS	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			11,188,000								
						2.Fasilitasi pembinaan rumah tangga PNS (mediasi dg Ibu Bupati, ketua dharma wanita, kemenag)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 orang	129,875,000									
						3.Fasilitasi pembinaan dan penyelesaian kasus disiplin PNS (termasuk kegiatan SIDAK)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 orang	158,937,000									

5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi ASN		64,70%	1,175,550,000	BKPSDM Kab. Mojokerto	-	69,53%	9,874,947,272		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	BKPSDM Kab. Mojokerto	5350 ASN	545,550,000	APBD Kab. Mojokerto	-	5350 ASN	4,674,947,272		
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi		5350 ASN	545,550,000	APBD Kab. Mojokerto	-	5350 ASN	4,674,947,272		
					1.Penyelenggaraan diklat, pelatihan, bimbingan teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Kompetensi		5350 orang	545,550,000			5350 ASN	4,674,947,272		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	BKPSDM Kab. Mojokerto	24 laporan	630,000,000	APBD Kab. Mojokerto	-	24 laporan	5.200.000.000		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Mojokerto	24 laporan	630,000,000	APBD Kab. Mojokerto	-	24 laporan	5.200.000.000		

					1.Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi		10 laporan	300,000,000					
					2.Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi		10 laporan	220,000,000					
					3.Honorarium PPTK, ATK , mamin, sppd dll	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi		4 laporan	110,000,000					
					JUMLAH				12,603,775,233				23,748,797,652	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di

laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Perangkat Daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1 Matrik Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/ P	B/ L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
	5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP	84,40 (A)	BKPSDM Kab. Mojokerto	6,548,13 3,233					
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target		90%	BKPSDM Kab. Mojokerto	15,00 0,000					
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	5,00 0,000					
		1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Renja		1 dokumen							
		2.Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Renja Perubahan		1 dokumen							
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	5,000,000					

		1.Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan		Jumlah Dokumen Evaluasi tiap Tribulan		4 dokumen							
		2.Penyusunan Dokumen LKJIP		Jumlah Dokumen LKJIP		1 dokumen							
		3.Penyusunan Dokumen SAKIP		Jumlah Dokumen SAKIP		1 dokumen							
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		87%	BKPSDM Kab. Mojokerto	5,322,164,000					
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/bulan	BKPSDM Kab. Mojokerto	5,322,164,000					
		1.Anggaran Penyediaan Gaji ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji ASN		38 Orang /bulan							
		2.Anggaran Penyediaan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN		38 Orang /bulan							
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		81,5	BKPSDM Kab. Mojokerto	5,000,000					
	5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi		38 Orang		5,000,000					
		Biaya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi		38 Orang							
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		86%	BKPSDM Kab. Mojokerto	279,967,353					

5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	BKPSDM Kab. Mojokerto	75,00 0,000					
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Laptop, Printer Laser, Air Purifier, AC Split, PC Dekstop All In One, Printer Warna, Scanner			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket							
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 paket	BKPSDM Kab. Mojokerto	14,16 0,853					
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			Jumlah Paket Mamin Rapat yang Disediakan		8 paket							
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		10 paket	BKPSDM Kab. Mojokerto	48,15 0,000					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		10 paket							
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		8 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	21,40 0,000					
	Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		8 dokumen							

5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		10 paket	BKPSDM Kab. Mojokerto	39,000,000					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		10 paket							
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		4 laporan	BKPSDM Kab. Mojokerto	9,550,000					
	Penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		4 laporan							
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 laporan	BKPSDM Kab. Mojokerto	72,706,500					
	Biaya Perjalanan Dinas pegawai			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		4 laporan							
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		91%	BKPSDM Kab. Mojokerto	191,146,880					
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	BKPSDM Kab. Mojokerto	56,000,000					
	1. Biaya Rekening Telepon dan Internet			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		12 laporan							

		2. Biaya Rekening Listrik		Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan							
5.03.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	BKPSDM Kab. Mojokerto	135,146,880					
		1. Belanja Gaji untuk Tenaga Harian Lepas / Non ASN		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan							
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		88%	BKPSDM Kab. Mojokerto	163,125,000					
5.03.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 unit	BKPSDM Kab. Mojokerto	66,000,000					
		1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara		5 unit							
		2. Biaya Perizinan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya		7 unit							
5.03.01.2.09.09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 unit	BKPSDM Kab.	11,176,100					

		Kantor dan Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Mojokerto						
		1.Biaya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor		Jumlah Sarana Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit		11,176,100					
	5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		7 unit	BKPSDM Kab. Mojokerto	25,00 0,000					
		1.Biaya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		7 unit		25,000,000					
	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah			Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN katagori Tinggi	73%	BKPSDM Kab. Mojokerto	4,880, 092,000					
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan/ formasi ASN, aplikasi sistem informasi yang dikelola, dan data ASN yang di rekonsiliasi dan dikelola		78%	BKPSDM Kab. Mojokerto	643,453,000					

				dengan baik arsip kepegawaiannya									
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		2 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	43,000,000					
	1.Persiapan Penyusunan Kebutuhan dengan seluruh PD/UKPD			Jumlah Dokumen Hasil penyusunan rencana kebutuhan ASN (Pengelolaan Formasi Pegawai)									
	2.Asistensi Penyusunan Kebutuhan dengan seluruh PD/UKPD				1 dokumen								
	3.Pelaksanaan kegiatan Koordinasi terkait ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait				1 dokumen								
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		3 dokumen		93,923,000					
	1. Rapat persiapan Pelaksanaan Sumpah PNS dan Penyerahan SK Pengangkatan CPNS/PNS/PPPK			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
	2.Pelaksanaan Sumpah PNS				1 dokumen								
	3.Penyerahan SK CPNS/PNS/PPPK				1 dokumen								

		serentak secara langsung											
		4.Pelaksanaan kegiatan Rapat dan Koordinasi terkait Pemberkasan usul NIP ASN ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait				1 dokumen							
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 dokumen							
		1.Pelaksanaan kegiatan Rapat dan Koordinasi terkait rencana pengadaan ASN dan ke BKN, Menpan RB, dan Instansi terkait lainnya			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								
		2.Kegiatan seleksi administratif pengadaan CPNS											
		3.Pelaksanaan SKD											
		4.Pelaksanaan SKB											
5.03.02.2.01.10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem	5 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	355,000,000					
		1.Pemeliharaan Aplikasi				1 dokumen							

		Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
		2. Pengadaan server dan upgrade infrastruktur					1 dokumen							
		3. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian					1 dokumen							
		4. Implementasi dan Evaluasi Aplikasi Kepegawaian					1 dokumen							
		5. Kegiatan rapat dan Koordinasi Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian dengan instansi terkait					1 dokumen							
5.03.02.2.01.11		Pengelolaan Data Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	151,530,000						
		1. Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen								
		2. Penyediaan Informasi dan Data Kepegawaian (Buku Profil/Buletin, DUK, Laporan)					1 dokumen							
		3. Pengelolaan Arsip Kepegawaian					1 dokumen							
		4. Pelayanan Kartu Identitas Kepegawaian (KARSU, KARIS, KARPEG, ID					1 dokumen							

		Card)											
		5.Kegiatan rapat dan Koordinasi Pengelolaan Data Kepegawaian dengan instansi terkait				1 dokumen							
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			Jumlah mutasi/ promosi ASN, dan ASN yang naik pangkat		15 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	997.287.000					
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		9 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	704,7 87,000					
	1.Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			Jumlah Dokumen Seleksi Terbuka		1 dokumen							
	2.Pelantikan JPTP, Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional			Jumlah Dokumen Hasil Pelantikan JPTP, pelantikan Jabatan Administrator dan pelantikan Jabatan Fungsional		4 dokumen							
	3.Biaya Setor Penilaian Kompetensi ASN/Assesment			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kompetensi ASN		4 dokumen							
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		6 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	292,50 0,000					
	1.Kenaikan Pangkat			Jumlah Pengelolaan		2 dokumen							

		Terpadu Periode April dan Oktober			Kenaikan Pangkat ASN									
		2.Monitoring dan Evaluasi Pangkat dan Pensiun Mei dan Nopember					2 dokumen							
		3.Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Serentak Periode April dan Oktober					2 dokumen							
						Persentase peningkatan kualifikasi ASN	77,2%	BKPSDM Kab. Mojokerto	154,6 40,000					
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan		125 orang	BKPSDM Kab. Mojokerto	154,6 40,000					
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		125 orang	BKPSDM Kab. Mojokerto	154,6 40,000					
		1.Pelaksanaan Ujian Dinas			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan									
		2.Pelaksanaan Tugas Belajar												
						Persentase peningkatan kinerja ASN	99,76%	BKPSDM Kab. Mojokerto	195,000,0 00					
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi			BKPSDM Kab. Mojokerto	360,000,0 00					

				penjatuhan hukuman disiplin									
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		2 dokumen	BKPSDM Kab. Mojokerto	155,000,000					
	1.Pengujian kesehatan CPNS dan PNS Sakit			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 dokumen							
	2.Fasilitasi dan sosialisasi penyusunan SKP					1 dokumen							
	3.Fasilitasi penilaian NSPK, merit sistem												
	4.Honorarium tenaga ahli dari KASN, dan BKN dalam rangka Penilaian NSPK dan Merit System												
	5.Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi BKN												
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		200 orang	BKPSDM Kab. Mojokerto	40,000,000					
	1.Konsultasi dan Fasilitasi Pemberian Penghargaan Satya Lencana (variabel penilaian NSPK)			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		200 orang							
					Persentase peningkatan kinerja ASN	0,24%	BKPSDM Kab. Mojokerto	165,000,000					

5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		100 orang	BKPSDM Kab. Mojokerto	16 5,000,000					
	1.Sosialisasi Peraturan Disiplin PNS			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan									
	2. Fasilitasi mediasi/pembinaan rumah tangga PNS					25 orang							
	3.Fasilitasi pembinaan dan penyelesaian kasus disiplin PNS (termasuk kegiatan SIDAK)					20 orang							
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				Persentase peningkatan kompetensi ASN	64,70%	BKPSDM Kab. Mojokerto	976.755., 000					
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin		5350 orang	BKPSDM Kab. Mojokerto	976.755,0 00					
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		5350 orang	BKPSDM Kab. Mojokerto	976.755,000					

		Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											
		1.Penyelenggaraan diklat, pelatihan, bimbingan teknis			Jumlah ASN yang Mengikuti Kompetensi	5350 orang		545,550,000					
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	24 laporan	BKPSDM Kab. Mojokerto	1.094.155,000					
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24 laporan	BKPSDM Kab. Mojokerto	1.094.155,000					
		1.Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	10 laporan							
		2.Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator				10 laporan							
		3.Honorarium PPTK, ATK , mamin, sppd dll				4 laporan							
JUMLAH ANGGARAN								10.136.744.333					

BAB V PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup BKPSDM, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat

pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

Mojokerto, 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660618 199003 1 011



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".